



**“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
dalam Membangun Karakter Bangsa
(Nation and Character Building):
Refleksi, Komitmen, dan Prospek**

Editor:
Prayoga Bestari
Syaifullah Syam



Laboratorium PKn
Universitas Pendidikan Indonesia

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Drs. H. Rahmat, M.Si.

Penanggung Jawab Pelaksana
Syaifullah, S.Pd., M.Si.

Ketua Penyunting
Dr. Prayoga Bestari, M.Si.

Sekretaris
Leni Anggraeni, M.Pd.
Susan Fitriyanti, M.Pd.

Sekretariat
Dede Iswandi, S.Pd.
Chandra

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Prayoga Bestari dan Syaifullah Syam (ed.), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa (Nation and Character Building): Refleksi, Komitmen dan Prospek*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, Bandung: cet. pertama, 2010

ISBN : 602-8418-21-8

Editor : Prayoga Bestari
Syaifullah Syam

Cetakan I : Desember 2010

Penerbit:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
FPIPS UPI

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Sambutan Dekan FPIPS UPI	iii
Sambutan Ketua Jurusan PKn.....	v
Pengantar Editor	vii
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter,	
<i>Abd. Jabar Abdul</i>	1
Pendidikan Karakter Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia : Tantangan dan Peluang Implementasi di Persekolahan,	
<i>Asep Mahpudz</i>	6
Membumikan Pancasila: Jalan Masih Panjang	
<i>Dr.Cecep Darmawan,S.Pd.,S.IP.,M.Si.</i>	14
PKn Sebagai Wahana Pendidikan Politik Yang Demokratik,	
<i>Dasman Lanin</i>	17
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter (Pendekatan dalam Perspektif Islam),	
<i>H. Denni Suryadi M.Pd.I.</i>	26
Citizen Entrepreneurship, Membina WNI Yang Berkarakter Bisnis,	
<i>Endang Danial. Ar</i>	34
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter,	
<i>Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</i>	44
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter,	
<i>Halking</i>	51
Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis "Enterpreneur" Dalam Rangka Membangun Tatanan Ekonomi Dunia Baru,	
<i>Dra. Iim Siti Masyitoh M.Si</i>	59

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM ERA GLOBALISASI, <i>Dr. Isnarmi Moeis M.Pd. M.A.</i>	70
INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PKn MELALUI CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING, <i>Kokom Komalasari</i>	77
PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DI TENGAH ARUS REFORMASI, <i>Laros Tuhuteru, M.Pd.</i>	88
MEMBANGUN KOMITMEN DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENGEMBANGAN SKETSA KEWARGANEGARAAN MULTIDIMENSIONAL, <i>Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.</i>	96
REFLEKSI KRITIS : KOMITMEN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH, <i>Machmud Al Rasyid</i>	106
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK WARGA NEGARA MUDA, <i>Drs. Mardi Widodo., M.Pd</i>	113
PENDIDIKAN MORAL WAHANA LAHIRNYA PENDIDIKAN KARAKTER, <i>Drs. Muhamad Halimi, M.Pd.</i>	119
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI, <i>Drs. Nurharmi, M.Si</i>	128
MENGGAGAS MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PERGURUAN TINGGI, <i>Dra. Nurul Zuriah, M.Si</i>	135

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MEMBANGUN KEBERADABAN BANGSA, <i>Dra. Pebriyenni, M.Si.</i>	147
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARAKTER SEBAGAI AKTUALISASI PENGUATAN BUDAYA DI SEKOLAH, <i>Dr. Prayoga Bestari, S.Pd.,M.Si</i>	154
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM DIRI ILMUWAN, <i>Rini Triastuti</i>	169
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER, <i>Rusnaini</i>	173
MENCARI FILSAFAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, <i>S. Ichas Hamid Al-lamri</i>	181
MEMBANGUN "BODY OF KNOWLEDGE" PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI <i>Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.</i>	190
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI, <i>Dr. Sri Haryati, M.Pd</i>	207
MENGAJARKAN NILAI-NILAI PADA ANAK UNTUK REKONSTRUKSI WAWASAN KEBANGSAAN, <i>Sri Rejeki, MPd</i>	214
PENDIDIKAN PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI, <i>Sumaryati</i>	219
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN PEMERSATU (INTEGRATING FORCE) BAGI BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN BANGSA, <i>Susan Fitriyanti, S.Pd, M.Pd</i>	225

PILAR HAM-HUKUM DAN PEMBINAAN WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIK, <i>Syafnil Effendi</i>	232
MEMBANGUN WARGANEGARA BERKARAKTER DI ERA GLOBAL, <i>Syaifullah, S.Pd., M.Si</i>	237
KEWARGANEGARAAN DAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA, <i>Tati Hartimah</i>	250
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI, <i>Triwahyuningsih</i>	256
WAJAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI INDONESIA SEBAGAI PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, <i>Winarno, SPd, MSi</i>	262
DIMENSI BERPIKIR DALAM MATAKULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Suatu Tinjauan Kritis Kaitannya dengan Pengembangan Karakter), <i>Drs. Yosaphat Haris Nusarastriya, M.Si</i>	270
INSTITUSI PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER DALAM MENDORONG PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMAYANG BERAKREDITASI SSN DAN SBI, <i>Purnomo Ananto</i>	278
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI BERBAGAI ISU STRATEGIS DAN WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI <i>Helmi Hasan</i>	287

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI

Triwahyuningsih¹

Abstrak

Upaya membangun masyarakat yang demokratis harus diiringi dengan suatu rekayasa untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen untuk membangun kultur demokratis.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi

PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Secara historis, dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi di Indonesia, yakni Civics (1957/1962) Pendidikan K masyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara, Civics dan hukum (1973) Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984) dan PPKn (1994). Di tingkat Perguruan Tinggi pernah ada matakuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960 an), Filsafat Pancasila (1970- sampai sekarang, Pendidikan Kewiraan (1989-1990 an) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000- sekarang).

Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak didik. Nilai-nilai itu disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter dan keperpihakan warga negara dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari baik kapasitasnya sebagai individu yang bebas otonom, maupun sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Pendidikan yang berhasil selalu dirumuskan dari sebuah pertanyaan fundamental : nilai-nilai apa yang akan disampaikan kepada seseorang agar memiliki karakter dan keberpihakan yang positif. Dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai

1 Dosen Program Studi PPKn FKIP UAD

wahana pendidikan demokrasi, nilai-nilai yang di sampaikan adalah nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai yang menopang bekerjanya masyarakat atau bangsa yang demokratis. Nilai-nilai itu adalah : Kebebasan, Tanggungjawab, Kemandirian, Hak untuk menentukan diri sendiri, Partisipasi (turut menentukan), Toleransi, Pertolongan agar bisa menolong diri sendiri, Pluralisme, Kemajuan, Perdamaian (M. Khoirun :1999 : 83-89).

Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan di era reformasi harus dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, *good governance*, negara hukum dan masyarakat madani di Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia Untuk itu Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sangat penting artinya bagi penumbuhan kultur demokrasi (*democratic culture*) di Indonesia (Azyumardi Azra, 2003 : 5). Sebagaimana dikatakan Benjamin Barber (1992) :

" Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai "(Margaret S. Branson, Dkk, 1999 :5)

MENUJU DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Menurut Merphin Panjaitan, *Pendidikan Kewarganegaraan* adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikan *Pendidikan Kewarganegaraan* sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis (Azyumardi Azra, 2003 : 9).

Salah satu keunggulan demokrasi Amerika adalah ia didukung oleh kultur, nilai dan karakter warga yang memungkinkan proses-proses demokrasi dapat terus dikembangkan. Warga Amerika menyadari bahwa *civic education* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk

mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Kesadaran ini lahir dari keyakinan bahwa etos demokrasi tidak diwariskan, tetapi harus dipelajari. Seperti ditegaskan oleh Alexis de Toqueville, setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional (Margaret S. Branson, Dkk, 1999 :vi).

Sedangkan Zamroni (2003 : vi-viii) Amerika dapat menjadi bangsa yang demokratis semenjak awal 1830 an, sebab mereka memiliki kultur demokratis dan struktur sosial politik yang subur untuk tumbuhnya kultur tersebut. Kultur demokrasi paling tidak mengandung dua aspek, yaitu :

Pertama, berujud dalam sifat egaliter dan liberal sebagai sumber dari Etika Puritanisme yang kemudia berhasil disosialisasikan kepada para pendatang dari daratan Eropa. **Kedua**, moral "menahan diri yang bersumber dari ajaran agama Protestan. Kemampuan menahan diri ini amat diperlukan untuk mengimbangi adanya kebebasan, seperti kebebasan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan memilih, kebebasan bertindak dan berbagai bentuk kebebasan yang lain. Demokrasi memerlukan moral menahan diri, tanpa kemampuan menahan diri, demokrasi akan berubah menjadi democrazy yang akan melahirkan tirani

Lebih lanjut Gabriel Almond (1996), dalam kesimpulannya tentang keterkaitan antara keberhasilan demokratisasi suatu bangsa dan keberadaan kultur dan struktur sosial politik yang demokratis, sebagai berikut ;

1. Kultur demokrasi adalah kultur campuran, antara kebebasan/ partisipasi di satu pihak dan norma-norma perilaku di pihak lain.
2. Kultur demokrasi bersumber pada kultur masyarakat secara umum, yang mengandung (a) social trust yang tinggi dan (b) *civicness*, kecenderungan kerja yang bersifat horisontal/ sederajat.
3. Kultur demokrasi senantiasa memerlukan dan berbasis masyarakat madani.
4. Seberapa jauh masyarakat memegang kultur demokrasi sangat tergantung pada perilaku pemerintah dalam berdemokrasi.

Karakter ini harus ditanamkan dan dibiasakan melalui kata-kata, pengajaran dan keteladanan. Artinya demokrasi bukan " mesin

dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu misalnya, seseorang harus paham dahulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya dengan masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk warga negara yang berpengetahuan, efektif dan bertanggungjawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. *The National Standards for civics and Government* dan *The Civics Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini sebagai berikut: kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi; menjelaskan dan menganalisis dan mengevaluasi; mengambil /menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu publik.

3. Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*): meliputi :
 - a. Menjadi anggota masyarakat yang independen
 - b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
 - c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu
 - d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
 - e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat .

Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wahana pendidikan demokrasi harus mencakup:

- aspek kognitif, yaitu membangun pengetahuan politik setiap peserta didik;
- aspek afektif yaitu membangun karakter, nilai-nilai yang diajarkan dan
- aspek psikomotorik yaitu membangun kecakapan peserta didik (kecakapan intelektual, berpikir kritis dan kecakapan partisipatoris).

PENUTUP

Secara kongkrit kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi; memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi serta berpikir kritis terhadap pemasalahannya; mampu berpartisipasi dalam upaya

menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, serta menghormati supremasi hukum; mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik; dan memiliki pemahaman internasional mengenai masyarakat madani (Supriatnoko 2008; Jakarta : Penaku).

Cara paling strategis untuk „mengalami demokrasi dan menjadi *civilized* adalah melalui “pendidikan kewarganegaraan”. Di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra . 2003 . *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media
- Margaret S. Branson, dkk.1999. *Belajar Civic Education dari Amerika.*,Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)
- M. Nur Khoirun, dkk.1999. *Pendidikan Politik bagi Warga Negara.* Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)
- Supriyatnoko 2008; *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Penaku
- Zamroni. 2003. *Civic Education. Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Demokratis dan Berkeadaban.* Yogyakarta :Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan The Asia Foundation (TAF)